KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) DI ZIMBABWE 2013-2018

(Skripsi)

Oleh

BIMO AVIANO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) DI ZIMBABWE 2013-2018

Oleh

BIMO AVIANO

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kepentingan Tiongkok dalam penerapan kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) di Zimbabawe periode tahun 2013-2018. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagimanakah kepentingan Tiongkok dalam program kebijakan *Belt and Road Initiative* di Zimbabwe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan konsep kepentingan nasional menurut Donald dan konsep kebijakan luar negeri menurut Mark. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman yang melalui tahapan kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dirujuk dari situs resmi *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC), situs resmi bonafit seperti *OEC World, WorldBank, CNN News, The Diplomat* dan lainnya serta didukung oleh gambaran dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari empat (4) kepentingan yang dijabarkan oleh Donald E. Nuechterlein dapat dikatakan jika kebijakan BRI yang diterapkan Tiongkok di Zimbabwe lebih dominan untuk memenuhi kepentingan ekonomi Tiongkok yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan industrinya akan bahan mentah, memperluas pasar dan jangkauan keuangannya ke negara-negara tujuan BRI hingga ke Afrika khususnya Zimbabwe. Jadi dapat dikatakan dari penerapan program BRI oleh Tiongkopk di Zimbabwe terdapat kepentingan ekonomi di dalamnya yang sesuai dengan bidang BRI itu sendiri, yaitu meningkatkan dan mengembangkan perekonomian dan infrsatruktur bagi negara yang dilalui atau ikut serta dalam program tersebut.

Kata kunci : kebijakan BRI, kepentingan nasional, Tiongkok, Afrika, Zimbabwe

ABSTRACK

CHINA'S INTEREST IN THE IMPLEMENTATION OF THE BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) POLICY IN THE ZIMBABWE 2013-2018

BY

BIMO AVIANO

The purpose of this study is to explain China's interests in implementing the Belt and Road Initiative (BRI) policy in Zimbabwe for the period 2013-2018. The formulation of the research problem is, what are China's interests in the Belt and Road Initiative policy program in Zimbabwe. This study uses a descriptive qualitative method with the concept of national interest according to Donald and the concept of foreign policy according to Mark. The data collection techniques in this study used literature and documentation studies. Data analysis uses the technique according to Miles and Huberman which goes through the stages of data condensation, data presentation and conclusion drawing. The data used is secondary data referenced from the official website of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), bona fide official websites such as OEC World, World Bank, CNN News, The Diplomat and others and supported by descriptions from previous research. The results of the study conclude that from the four (4) interests described by Donald E. Nuechterlein, it can be said that the BRI policy implemented by China in Zimbabwe is more dominant in meeting China's economic interests which try to meet its industrial needs for raw materials, expand its market and financial reach to other countries. BRI's destination countries to Africa, especially Zimbabwe. So it can be said that from the implementation of the BRI program by China in Zimbabwe, there is an economic interest in it which is in line with the objectives of BRI itself, namely to improve and develop the economy and infrastructure for the countries that are passed through or participate in the program.

Keywords : BRI Policy, National Interest, Tiongkok, Africa, Zimbabwe

Skripsi	: **KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) DI ZIMBABWE 2013-2018**
Nama Mahasiswa	: **Bimo Aviano**
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1516071032**
Program Studi	: **Hubungan Internasional**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Agus Hadiawan M.Si.	**Tety Rachmawati S.IP., M.A.**
NIP. 19580109 1986303 1 002	NIP. 19920309 201903 2 020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Drs. Agus Hadiawan M.Si.** .....

   Sekretaris : **Tety Rachmawati, S.IP., M.A.** .....

   Penguji : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulu Ujian Skripsi : **14 Juni 2022**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: http://hi.fisip.unila.ac.id/

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
5C690AJX643294770

Bimo Aviano
NPM. 1516071032

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Bimo Aviano, lahir di Kota Metro pada tanggal 31 Maret 1997, anak pertama pertama dan terakhir dari pasangan Bapak Wahyono dan Ibu Suwarsini. Pendidikan formal yang pernah peneliti tempuh dan selesaikan yaitu Sekolah Dasar Xaverius Kota Metro Lampung pada tahun 2009, Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 1 (satu) Kota Metro Lampung pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 (satu) Kota Metro Lampung pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 peneliti memulai pendidikan sekolah tinggi di Universitas Lampung, Jurusan Hubungan Internasional melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa Jurusan Hub

ungan Internasional, pernah aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Japanese Club Unila dan Rakanila. Peneliti berkesempatan melakukan kegiatan magang di BAPPEDA Bandar Lampung serta pernah mengikuti Perlombaan IEL Tournament University Series Season 2 pada tahun 2020.

MOTTO

"Menyerang Adalah Pertahanan Terbaik, Jika Tidak Bisa Memenangkan Pertarungan, Cobalah Mengakalinya. Namum, Orang Terkuat Adalah Orang Yang Bisa Mengendalikan Amarahnya"

Bimo Aviano

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan kerendahan hati dan ketulusan, ku persembahkan skripsi ini kepada

Allah SWT

Atas kehendak-Nya, semual hal dapat terjadi.
Atas kehendak-Nya, semua mampu terlewati.
Atas ridho-Nya, semua dapat tercapai.

Bapak Wahyono dan Ibu Suwarsini

Karya Sederhanaku ini sebagai tanda terima kasih dan sebagai wujud Baktiku sebagai anak satu-satunya yang harus bisa membanggakan orang tua, terima kasih atas kasih sayangnya, dukungan dan do'a yang telah diberikan sampai saat ini.

Serta Jurusanku Hubungan Internasional Universitas Lampung yang aku cintai dan aku banggakan

SANWANCANA

Alhamdulillah puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kepentingan Tiongkok Dalam Penerapan Kebijakan Belt And Road Initiative (BRI) Di Zimbabwe 2013-2018. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas kebenaran firman dan cahaya zaman yang dibawa oleh-Nya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.Peneliti mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak saat menyusun skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas keridhoannya selama ini didalam hidup saya dan Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya kepada umat manusia hingga akhir zaman.
2. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Wahyono dan Ibu Suwarsini yang selalu mensupport secara mental dan finansial.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Agus Hadiawah M.Si., selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta membantu dalam skripsi saya hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing kedua saya yang sudah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, dan mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.Si., Selaku dosen pembahas dan penguji yang sudah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna bagi penyusunan skripsi saya.

7. Seluruh jajaran dosen FISIP, terutamajurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan staf jurusan atas dukungan pembelajaran selama perkuliahan, serta membantu proses administrasi.
8. Keluarga besar di Lampung yang sudah mendo'akan dan memberi semangat kepada saya.
9. Terima kasih kepada Annisa Erlitsya Marchelina yang tidak ada lelahnya untuk mengingatkan mengerjakan skripsi dan revisi, yang selalu mensupport, menyemangati dan menemani selama pembuatan skripsi saya.
10. Kepada teman-teman Dota Malam Ceria yang setiap malam menemani revisian dan menghiburdisaat stress saatmembuatskripsi.
11. Kepada rekan-rekan toko Rocket yang telah menyediakan jasa print termurah Se-UNILA.
12. Terimakasih untuk teman-teman HI Angkatan 2015 yang membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya, selalu mensupport dan menjadi teman diskusi dalam membuat skripsi saya. Semoga kita semua dapat menggapai cita-cita kita masing-masing dan selalu di lindungi Tuhan Yang Maha Esa.
13. Serta seluruh pihak yang telah mendo'akan dan mendukung saya dalam penulisan.

Bandar Lampung, 14Juni 2022

Penulis

Bimo Aviano

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR SINGKATAN ..... **v**
I.PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Kegunaan Penelitian 8
1.5 Manfaat Penelitian 9
II.TINJAUN PUSTAKA 10
2.1 Penelitian Terdahulu 10
2.2 Landasan Konseptual 17
2.2.1 Konsep Kepentingan Nasional 17
2.2.2 Konsep Kebijakan Luar negeri 19
2.3 Kerangka Pemikiran 21
III.METODOLOGI PENELITIAN 23
3.1 Tipe Penelitian 23
3.2 Fokus Penelitian 23
3.3 Jenis dan Sumber Data 24
3.4 Teknik Pengumpulan Data 25
3.5 Teknik Pengolahan 26
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 28

4.1 Sejarah Hubungan Ekonomi dan Program Belt & Road Initiative Antara Tiongkok dan Zimbabwe 28
4.1.1 Kerjasama Ekonomi Tiongkok Dengan Zimbabwe 33
4.1.2 Hubungan Ekonomi Dan Politik Antara Tiongkok Dan Zimbabwe 40
4.2 Kebijakan Belt & Road Initiative di Zimbabwe 42
4.3 Kepentingan Tiongkok Dalam Menerapkan Kebijakan BRI di Zimbabwe 44
4.3.1 Kepentingan Ekonomi 44
4.3.1.1 Memperluas Jalur Perdagangan dan Area Ekspansi Pasar Di Afrika 45
4.3.1.2 Membangun Dan Memperluas Jangkauan Keuangan Tiongkok 52
4.3.1.3 Mendapatkan Keuntungan Dari Sumber Daya Alam Zimbabwe 54
4.3.2 Kepentingan Ideologi 56
4.3.2.1 Mengekspor Ideologi Pemerintah Tiongkok 57
4.3.3 Kepentingan Pertahanan 61
4.3.3.1 Membendung Pengaruh Atau Kekuatan Amerika Serikat Di Kawasan Afrika Dan Zimbabwe 61
4.3.4 Kepentingan Tata Internasional 67
4.3.4.1 Membangun Sino-Centist 67
V.KESIMPULAN DAN SARAN 74
5.1 Kesimpulan 74
5.2 Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Kerangka Pikir 22
4.1 Old Silk Road..... 29
4.2 Peta One Belt One Road/New Silk Road..... 31
4.3 Ekspor Impor Tiongkok Terhadap Zimbabwe Dalam Satuan USD 36
4.4 Ekspor Impor Antara Zimbabwe Dan Tiongkok Dalam Satuan USD..... 58
4.5 Pengaruh Keterlibatan Tiongkok Dan Amerika Serikat Di Afrika..... 66
4.6 Peta Negara yang tergabungdalam BRI tahun 2017 70
4.7 Peta Pengaruh Ekonomi Dan Politik Tiongkok Di Kawasan Afrika 72

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Komparasi Penelitian Terdahulu 16
4.1 Komoditas Ekspor Terbesar Zimbabwe tahun 2008 34
4.2 PDB Zimbabwe Tahun 2007-2012 39
4.3 PDB Tahun 2001-2006 Zimbabwe 38
4.4 PDB Zimbabwe Pasca Land Reform 46
4.5 PDB Tahun 2013-2018 Zimbabwe Dalam USD 51
4.6 Perbandingan Investasi Asing Antara Tiongkok Dengan AS 53
4.7 Impor Sumber Daya Alam Tiongkok Dari Zimbabwe Tahun 2013-2018 55
4.8 Perusahaan Multinasional Euro-Amerika Yang Di Tarik Dari Zimbabwe 63

DAFTAR SINGKATAN

AFDB	: *AfricanDevelopment Bank*
AFECC	: *Anhui Foreign Economic Construction Group Limited*
AIIB	: *Asia Infrastructure Investment Bank*
ANC	: *African National Congres*
AS	: Amerika Serikat
BMATT	: *The British Military Advisory Training Team*
BRI	: *Belt And Road Initiative*
CPEC	: *China-Pakistan Economic Belt*
DRC	: *Democratic Republic of Congo*
ECRL	: *The East Coast Rail Link*
FOCAC	: *Forum On China-Africa Cooperation*
FLMSA	: *Liberation Movements Of Southern Africa*
FRELIMO	: *Liberation Front Of Mozambique*
FTLRP	: *The Fast Track Land Reform Programme*
GDP	: *Gross Domestic Product*
HAM	: Hak Asasi Manusia
IB	: *International Bank*
IMF	: *International Monetary Fund*
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MMCZ	: *Mineral Marketing Corporation of Zimbabwe*
MPP	: *The Multi-Product Pipeline*
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PRGF	: *Poverty Reduction And Growth Facility*
S1	: Strata Satu
SRF	: *The Silk Road Fund*

TRIMs	: *Trade Related Investment Measures*
TSGP	: *Trans-Sabah Gas Pipeline*
UNGA	: *United Nations General Assembly*
USD	: *United Stated Dollar*
WTO	: *World Trade Center*
ZANU	: *Zimbabwe African National Union*
ZANU-FP	: *Zimbabwe African National Union-Front Patriotic*
ZIDERA	: *Zimbabwe Democracy And Economic Recovery Act*
ZWD	: *Zimbabwean Dollar*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tiongkok merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, terlihat dari perekonomian Tiongkok yang bisa menyaingi perekonomian negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat.[1] Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat melalui pertumbuhan dalam bidang industri maupun teknologi yang telah dihasilkan oleh Tiongkok.[2] Hal ini dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, karena tidak ada negara yang tidak membutuhkan negara lain dan dapat berjalan mandiri tanpa bantuan negara lain.

Kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara Afrika merupakan agenda penting bagi Tiongkok untuk mencari sumber daya/sumber energi yang banyak terdapat di negara-negara Afrika seperti minyak dan sumber daya mentah lainnya. Agenda tersebut merupakan kerjasama Bilateral yang berupa Tiongkok menyediakan anggaran tahunan khusus untuk memberikan pinjaman terhadap negara-negara Afrika yang menjadi target tujuan kerjasama. Tiongkok memilih negara-negara Afrika sebagai tujuan karena banyak negara-negara Barat yang kurang memandang Afrika sebagai tempat investasi atau sebagai sumber energi, selain itu banyak negara di Afrika yang memiliki sumber energi yang dibutuhkan Tiongkok dalam memajukkan sektor industri mereka. Industri Tiongkok saat ini sangat didesak oleh kebutuhan sumber energi, karena produk Tiongkok hampir seluruhnya membanjiri pasar di berbagai negara belahan dunia. Hal ini membuat Tiongkok menjadi pesaing kuat bagi negara Amerika Serikat yang sejak lama

---

[1]Ratih Dewanty Putri, *Diplomasi Ekonomi China Di Sudan*, UMM:FISIP-HI, Hal.56
[2]Ibid, Hal. 54

mendominasi pasar dunia. Tiongkok juga memandang hasil tambang Afrika sebagai sebuah investasi yang menghasilkan keuntungan yang besar.[3] Oleh sebab itu, Tiongkok ingin memperoleh akses yang kuat terhadap hasil pertambangan tersebut. Dalam memenuhi hal tersebut Tiongkok memperbarui kebijakan *Silk Road* menjadi *New Silk Road* yang nantinya akan diterapkan di berbagai negara yang telah direncanakan.

Salah satu negara Afrika yang menarik Tiongkok untuk melakukan investasi yaitu Zimbabwe. Tiongkok dan Zimbabwe telah menjalin hubungan sejak tahun 1970-an yang saat itu sedang terjadi perebutan kekuasaan di pemerintahan Zimbabwe pasca kemerdekaan dari Inggris. Dalam perselisihan yang terjadi antara kaum minoritas kulit putih Eropa dengan penduduk asli Afrika. Kaum Eropa di bawah kekuasaan Britania Raya yang dipimpin oleh Cecil Rhodes yang memipin wilayah Rhoedesia saat itu. Rhodesia merupakan wilayah Zimbabwe saat masih dikuasai Britania Raya. Dalam tersebut Tiongkok memberikan dukungan militer berupa bantuan militer dan strategis terhadap *Zimbabwe African National Union* (ZANU) dalam memperjuangkan kemerdekaanya.[4] Berkat dukungan tersebut Zimbabwe berhasil memegang kursi kekuasaan dengan pemimpinnya yaitu Robert Mugabe yang diangkat menjadi Presiden Zimbabwe yang membuat hubungan antara Tiongkok dan Zimbabwe semakin baik serta memudahkan Tiongkok untuk menjalin kerjasama. Hubungan kedua negara ini semakin meningkat setelah terbentuknya*Forum On China-Africa Cooperation*(FOCAC) ditahun 2000. Banyak dukungan yang telah diberikan Tiongkok terhadap Zimbabwe yang dibalas dengan memberikan kemudahan bagi Tiongkok untuk mengakses sumber daya alam di Zimbabwe. Hal ini sesuai dengan tujuan FOCAC yaitu melanjutkan reformasi ekonomi berupa penerapan atas *Open Door policy*. FOCAC juga bertujuan untuk melakukan *Re-Engangement*dengan negara-negara Afrika yang dilatarbelakangi untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah bagi industri Tiongkok yang banyak terdapat di negara Afrika salah satunya Zimbabwe.[5]

---

[3]Ibid, Hal 14
[4]Nurdiani Fathiriani, *Politik Luar Negeri China Terhadap Zimbabwe, Universitas Pendidikan Indonesia*, E-journal Vol 8, No 1 2019.
[5]Wiwit Tri Rahayu, *Strategi Dalam Mendominasi Hubungan Kerjasama Ekonomi Dengan Zimbabwe (2000-2015)*, UNAIR:FISIP HI, Hal 2.

Zimbabwe merdeka pada tanggal 18 April 1980. Setelah merdeka diangkatlah Robert Mugabe sebagai presiden negara secara resmi pada tanggal 31 Desember 1987 hinggahingga 21 november 2017.[6] Setelah lengser dari jabatnnya, kini Zimbabwe dipimpin oleh presiden Emmerson Mnangagwa. Dibawah pimpinan Mugabe, banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masyarakat dan juga kasus korupsi yang memperburuk keadaan ekonomi Zimbabwe. Zimbabwe merupakan negara Afrika bagian selatan yang memiliki kekayaan alam dan menghasilkan produksi seperti gula, buah-buahan, jagung, tembakau dan berbagai ternak. Namun kekayaaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena negara Afrika Selatan ini mengalami perlambatan ekonomi yang disebabkan pengelolaan buruk, meningkatnya inflasi dan minimnya devisa yang diperoleh yang menyebabkan terjadinya hiperinflasi pada tahun 2008.[7] Meningkatnya inflasi disebabkan karena diberlakukkannya kebijakan pengambilalihan yang menyebabkan para petani kulit putih kehilangan lahan mereka, sehingga hasil pertanian Zimbabwe saat itu berkurang. Karena terjadi penurunan hasil produksi membuat pendapatan negara berkurang, akan tetapi pengeluaran untuk keperluan pemerintahan, Fasilitas umum tetap berjalan. Setelah itu pemerintah memerintahkan untuk terus mencetak uang sebagai sarana pembiayaaan operasinal negara.

Langkah tersebut yang menyebabkan peredaran uang bertambah, akan tetapi barang yang bisa dibeli tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari rakyat Zimbabwe. Hal ini yang membuat Zimbabwe mulai mengalami penurunan nilai mata uang secara drastis. Inflasi tertinggi yang pernah tercatat di Zimbabwe yaitu sebesar 100.580,2% yang diukur berdasarkan indeks semua jenis barang konsumsi dari Januari 2007 sampai Januari 2008 dan merupakan inflasi terbesar,dari segi makanan dan minuman non alkohol mencapai 105.428% dan non makanan berada di angka 97.885%. Angka inflasi tersebut menunjukkan betapa hancurnya perekonoman Zimbabwe saat itu. Tercatat 80% penduduk dari total 14 juta

---

[6]*Keterangan Dasar Negara Republik Zimbabwe*, https://bit.ly/2Bg9L9Q, Diakses pada26 Juni 2020 Pukul 20.25 WIB.

[7] Irianti, 2013. *"Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Hyperinflasi di Zimbabwe"*http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5647/BAB-V-IRIANTI-PENGARUH%20UTANG%20LUAR%20NEGERI%20TERHADAP%20HIPERINFLA.doc?sequence=5, Diakses pada 19 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB

penduduk berada di bawah garis kemiskinan.[8] Walaupun demikian Tiongkok tetap melakukan kerjasama internasional pada Zimbabwe. Tiongkok mengangap Zimbabwe sebagai mitra dagang, investor dan donor utama pembangunan bagi Zimbabwe.

Pada tahun 2000 *International Monetary Fund* (IMF) menghentikan semua pemberian bantuan dana terhadap Zimbabwe dan disusul oleh *World Bank* di tahun 2002 dan *AfricanDevelopment Bank* (AFDB) sejak tahun 1999. Pemberhentian bantuan tersebut terjadi dikarenakan Di tahun 2000, pemerintah Zimbabwe mengeluarkan kebijakan tentang pengambil alihan lahan yang disebut dengan *The Fast Track Land Reform Programme* (FTLRP) yang isinya mengenai pengambil alihan lahan pertanian kulit putih secara paksa tanpa kompensasi apapun oleh veteran perang, militant *Zimbabwe African National Union-Front Patriotic* (ZANU-FP) dan petani kulit hitam.[9] Tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan illegal dan kejahatan terhadap hak milik properti dan praktik kekerasan melalui intimidasi dan pemukulan. Serta terdapat praktik korupsi oleh para elit pemerintah dengan banyaknya bukti kepemilikan lahan yang diambil paksa mayoritas di bawah kepemilikan anggota senior ZANU-PF, pemerintah dan militer. Hal lainnya yaitu adanya keterlibatan Zimbabwe dalam konflik *Democratic Republic of Congo* (DRC). Konflik ini terjadi karena adanya perang saudara antar suku sejak tahun 1998 di wilayah Kongo yang menyebabkan seluruh wilayah Kongo hancur dan berdampak pada negara disekitarnya. [10] Karena hal itu membuat Kongo meminta bantuan pada negara lain dan membuahkan hasil dimana 4 negara setuju membantu Kongo yaitu Angola, Chad, Namibia dan Zimbabwe. Akan tetapi 4 negara tersebut memberikan bantuan kepada milisi anti-pemerintah Kongo. Dalam hal ini Zimbabwe memberikan bantuan berupa tentara dan dana yang diperkirakan berjumlah 3 juta USD (United Stated Dollar) perhari dan total pengeluaran

---

[8] Berita Kompas.com "Inflasi di Zimbabwe 100.000 Persen" https://sains.kompas.com/read/2008/02/21/01230169/inflasi.di.zimbabwe.100.000.persen. Diakses pada 19 Januari 2020 Pukul 12.00 WIB

[9] Wulan An Nuuru "*Analisis Teori Strukturisasi Dalam Memahami Hubungan Kerja Sama China Dengan Zimbabwe Paska Isolasi Komunitas Internasional (2003-2013)*" Jurnal Analisis HI, Vol 7 No. 1 Januari 2018, Hal. 204

[10] Zulkarnain, "*Peran Uni Afrika Dalam Menyelsaikan Konflik di Kongo Zulkarnain. Politik",*

Buku Ilmu dan Budaya Vol. 1 Tahun 2009, Hal. 3986

mencapai 6 milyar ZWD (Zimbabwean Dollar).[11] Dengan pengeluaran sebanyak ini membuat stabilitas ekonomi dan politik di Zimbabwe mulai tidak stabil. Karena Zimbabwe memberikan bantuan pada konflik DRC membuat institusi internasional seperti IMF, *World Bank* dan AFDB memberikan sanksi berupa suspensi bantuan dana.

Terisolasi dari komunitas internasional terutama negara barat, membuat perekonomian Zimbabwe semakin memburuk dan Produk Domestik Bruto (PDB) Zimbabwe berada paling bawah di antara negara-negara Afrika Selatan. Menanggapi hal ini pada tahun 2003 Presiden Mugabe mencetuskan kebijakan *Look East Policy* yang bertujuan menjalin kerjasama investasi dari negara-negara Asia seperti Malaysia, Singapura dan Tiongkok.[12] Dengan adanya kebijakan ini, Tiongkok merespon Zimbabwe sebagai mitra pilihan dengan memberikan berbagai bantuan bahkan bersifat *Unconditional Aid* guna mengatasi permasalahan dan mendorong pembangunan ekonomi di Zimbabwe melalui kerangka kerja *Strategic Partnership* menggantikan peranan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (Bank Dunia) bagi Zimbabwe.

Kebijakan terbaru Tiongkok yang dibuat pada tahun 2013 lalu disahkan oleh Xi Jinping dan perdana Menteri Li Keqiang yaitu *Silk Road* Tiongkok atau *Belt And Road Initiative* (BRI) terdiri dari 2 komponen yaitu pertama *"Silk Road Economic Belt"*, yang kedua yaitu *"21st Century Marines Silk Road"*. Kebijakan ini merupakan salah satu komponen utama dari reformasi yang dilakukan oleh Xi Jinping. Gagasan berupa *Silk Road Economic Belt* dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan perdagangan antara Tiongkok dengan negara tujuan yang diharapkan dapat tumbuh hingga 168% dalam waktu 10 tahun terakhir. [13] Gagasan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat komunikasi kebijakan, meningkatkan kerjasama ekonomi dan moneter, menghilangkan hambatan perdagangan dan meningkatkan transportasi dari Pasifik ke Laut Baltik, dari Asia Tengah ke Samudra Hindia dan akhirnya ke Asia Barat dan Selatan.

---

[11]Wiwit Tri Rahayu, *Strategi Dalam Mendominasi Hubungan Kerjasama Ekonomi Dengan Zimbabwe (2000-2015)*, UNAIR:FISIP HI, Hal 6
[12]Ibid Hal. 205
[13] Ni Putu Saraswati Puspita Dewi dan Hikmatul Akbar, Jurnal "*Kebijakan The New Silk Road Cina Di Bawah Pemerintahan Xi Jinping"*, Vol 9 No 1 (2017), Hal. 6-7.

Kebijakan Tiongkok bertujuan untuk membangun kembali jalur sutra yang merupakan jalur perdagangan lama dan memperbaruinya dengan membangun infrastruktur dan transportasi yang akan mendukung jalannya arus perdagangan, investasi, pertukaran budaya yang nantinya dapat membantu pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam *The New Silk Road* ini, diusulkan berbagai proyek pembangunan jalur sutra modern seperti menciptakan jaringan kereta api, pipa, jalan dan pelabuhan-pelabuhan yang akan menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, Asia Tengah, Asia Barat, sebagian Asia Selatan dan Afrika. Dalam kebijakan ini juga terdapat 5 usulan utama yang dapat memperkuat hubungan antara Tiongkok, Asia Tengah dan Eropa yaitu dengan memperkuat komunikasi kebijakan, memperkuat hubungan, fasilitasi perdagangan, kerjasama moneter dan mempererat hubungan antar masyarakat.[14]Tujuan dari pembangunan jalan ini yaitu membuat sebuah kerjasama ekonomi tersebesar di dunia, termasuk koordinasi kebijakan, perdagangan dan kerjasama sosial dan budaya.

Di Afrika Selatan terdapat investasi infrastruktur yaitu dengan mulai mengadakan pembangunan pelabuhan dan titik temu laut yang akan di kombinasikan dengan rel ke negara-negara Afrika yang terkurung daratan. Pada Desember 2015, Xi jinping mengunjungi Zimbabwe dengan tujuan untuk memimpin penandatanganan berbagai jenis perjanian untuk meningkatkan dan membangun kembali infrastruktur Zimbabwe. Dalam kunjungan tersebut Tiongkok memberikan pinjaman sebesar US$ 1 milyar untuk memperluas pembangkit listrik termal terbesar di Zimbabwe.[15] Dana tersebut telah di terima Zimbabwe dan dikenakan bunga yang rendah.

Dalam hubungan ekspor impor antara Zimbabwe dan Tiongkok, Tiongkok berhasil menjadikan Zimbabwe sebagai negara importir bahan mentah dan ekspor atas barang jadi. Tiongkok berhasil menguasai beberapa perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan bahan mentah Tiongkok, seperti perusahaan agrikultur dan pertambangan. Tiongkok terbukti berhasil mendominasi atas bidang tersebut, dibuktikan pada tahun 2008 *Mineral Marketing Corporation of*

---

[14]Ibid Hal 7.

[15]*Zimbabwe Memutuskan Untuk Gunakan Yuan China Sebagai Mata Uang Utama* http://forum.forexindo.com/threads/zimbabwe-memutuskan-untuk-gunakan-yuan-china-sebagai-mata-uang-utama.332459/. Diakses pada 20 Januari 2020, Pukul 14.00 WIB.

Zimbabwe(MMCZ) menandatangani nota kesepakatan dengan perusahaan nikel Tiongkok yaitu Jinchuan Nickel Maining Company of China yang merupakan produsen nikel dan kobalt terbesar di Tiongkok yang memiliki kapasitas produksi sebesar 130.000 ton nikel, 200.000 ton tembakau dan 6000 ton kobalt pertahunnya.[16] Selain impor, Tiongkok juga berhasil menjual barang-barang produksi ke Zimbabwe dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan harga lokal, sehingga barang ekspor tersebut lebih diminati dan mendominasi di pasar Zimbabwe.

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat dominasi ekonomi yang dilakukan Tiongkok kepada Zimbabwe dengan menguasai beberapa perusahaan bahan mentah di Zimbabwe. Selain itu Zimbabwe juga merupakan pasar bagi Tiongkok untuk menjual kembali hasil industri mereka yang bahan mentahnya berasal dari Zimbabwe.

Hal ini sangat menguntungkanbagi Tiongkok karena dapat memenuhi pasokan bahan mentah dan mengirim kembali menjadi barang jadi yang sangat diminati oleh konsumen maupun pembeli di pasar Zimbabwe karena harga yang lebih kompetitif dibanding pasar lokal.

Berdasarkan uraian diatas, Kebijakan BRI merupakan pembaruan dari kebijakan jalur sutra lama atau *Silk Road*. Kebijakan ini pertama kali diterapkan di Era Xi Jinping tahun 2013. Tujuan dari penerapan ini untuk menjalin hubungan dagang dengan membuat jalur sutra di darat dan dilaut dengan melakukan pembangunan infrastruktur di negara yang dilewati jalur sutra tersebut. Investasi dan pembangunan infrastruktur menjadi strategi utama Tiongkok untuk menawarkan kebijakan ini kepada negara lain. Di sisi lain kebijakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dan bahan mentah dari Tiongkok yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di negara Tiongkok. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Tiongkok menerapakan kebijakan tersebut ke negara Zimbabwe sebagai salah satu negara yang sudah menjalin kerjasama dengan Tiongkok dalam bentuk investasi dan pembangunan infrastruktur. Dalam penilitian ini akan dibahas kenapa

[16]Wiwit Tri Rahayu, *Strategi Dalam Mendominasi Hubungan Kerjasama Ekonomi Dengan Zimbabwe (2000-2015)*, UNAIR:FISIP HI, hal. 3

Tiongkok tetap menjalin kerjasama dengan Zimbabwe yang keadaaan ekonominya sedang terpuruk karena mengalami hiperinflasi terburuk dalam sejarah. Untuk itu penelitian ini akan membahas hal tersebut dan mencari tahu kepentingan Tiongkok dalam penerapan kebijakan BRI di Zimbabwe.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti halnya kerjasama yang dilakukan Tiongkok kepada negara Kawasan Afrika, serta membuat kebijakan BRI yang salah satu kebijakannya berani memberikan pinjaman ke salah satu negara yang memiliki perekonomian yang sedang runtuh seperti Zimbabwe, dimana organisasi internasional seperti IMF dan *World Bank* sudah memberhentikan semua bantuan yang diberikan kepada Zimbabwe. Hal ini menarik,bahwasanya negara-negara Barat belum sepenuhnya yakin memberikan investasi ke kawasan Afrika, Tiongkok justru menjadikan Kawasan Afrika sebagai ladang sumber energi dan Kawasan Investasi bagi mereka. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu“**Bagaimanakah Kepentingan Tiongkok Dalam Program Kebijakan BRI Di Zimbabwe?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian rumusan masalah tersebut, maka penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kebijakan BRI, mendeskripsikan kebutuhan Tiongkok dan menjelaskan kepentingan penerapan kebijakan BRI di Zimbabwe periode tahun 2013-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari :

1. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin Ilmu

Hubungan Internasional khususnya di bidang kepentingan nasional dan ekonomi internasional dalam bidang perdagangan,

2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber informasi bersama, di kalangan pelajar Ilmu Hubungan Internasional khususnya dan sebagai saran dan masukan kepada semua kalangan yang ingin mengkajipenerapan kebijakan *Belt And Road Initiative* dalam hal perkembangan ekonomi negara Afrika khusunya Zimbabwe.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Dari Penelitian ini terdiri dari :

1. Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan studi peneliti pada tingkat strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan *Belt And Road Initiative* (BRI) oleh Tiongkok terhadap Perekonomian Zimbabwe

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang bertemakan kerjasama Tiongkok dengan negara-negara Afrika atau tentang Kebijakan *Belt And Road Initiative* telah banyak dilakukan. Pada bagian ini, peneliti akan mereview lima (5)penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yogo Aminanto Pribadi, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang terkait dengan kebijakan BRI Tiongkok yang berjudul *Kepentingan Ekonomi Dan Keamanan China Dalam Kebijakan New Silk Road Tahun 2008-2013*. Dalam penelitian ini menggambarkan pengembangan kebijakan nasional *New Silk Road* pada masa kepemimpinan Hu Jintao hinga Xi Jinping tahun 2008-2013. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana dinamika hubungan luar negeri Tiongkok serta perkembangan ekonomi-politik dan liberalisasi kerjasama internasional Tiongkok di periode 2008-2013. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa dinamika politik-pemerintahan negara dunia pada peradaban modern tidak luput dari perkembangan sejarah di masa lampau yang memberikan berbagai pengalaman dalam menjalankan sistem kenegaraan. Terbukti dari terciptanya *Silk Road* yang telah berkembang di abad ke 207 SM dibawah kepemimpinan Dinasti Han yang berhasil menghubungkan Tiongkok dengan negara dunia.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa Tiongkok memutuskan untuk mengembangkan kembali kebijakan *New Silk Road* pada masa kepemimpinan Hu Jintao hinga Xi Jinping tahun 2008-2013 dengan menggunakan teori Kepentingan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu alasan Tiongkok menerapkan *New Silk Road* pada masa kepimpinan Hu Jintao hingga Xi Jinping, mengetahui perkembangan dinamika hubungan luar negeri, perkembangan ekonomi, politik dan liberalisasi internasional khususnya pada tahun 2008-2013. Dalam penelitian ini dibahas tentang sejarah perkembangan *Silk Road*, dan bagaimana Ekspansi *Silk Road* ke luar negeri serta latar belakang dan perkembangan *New Silk Road*.

Dengan adanya *Silk Road* dimasa itu, Kekaisaran China dapat membentuk perwakilan dagang, membentuk pangsa pasar dan menyediakan bahan baku. Dengan adanya *Silk Road*, Kekaisaran China berhasil menjalin hubungan baik dengan beberapa negara yang pada masa itu masih berbentuk Monarkhi. Dengan adanya *Silk Road* dinamika ekonomi-politik internasional China semakin maju. Di bawah pemerintahan Hu Jintao hingga Xi Jinping, Tiongkok berhasil mentransformasikan *New Silk Road*.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu penulis menyimpulkan Orientasi *New Silk Road* dibuat untuk membuka akses hingga melewati wilayah Asia Tengah dengan memberikan tawaran bantuan luar negeri, investasi serta mengembangkan pariwisata dan kontak masyarakat. Di wilayah Eropa bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Di penelitian ini menjelaskan *New Silk Road* dimaksudkan untuk mendukung kepentingan nasional dalam aspek politik dan keamanan. Kebijakan ini juga sebagai alat bagi Tiongkok untuk menunjukkan hegemoninya dan membuat Tiongkok menjadi negara adikuasa baru pada bidang ekonomi dan perdagangan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hari Prasetio, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul Debt-Trap Diplomacy : Strategi China Era Xi Jinping dalam menguasai ekonomi di Kawasan Afrika. Dalam latar belakang penelitian ini menjelaskantentang munculnya Rising China dalam perkembangan global yang tunjukan dengan adanya pertumbuhan militer, pengaruh politik dominan di tatanan global, terbukti di tengah krisis global tahun 2008 China dalam waktu 6 tahun bisa meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dua kali lipat, dari US$ 4,5 Triliun tahun 2008 menjadi US$9 Triliun di tahun 2014.

Di bidang ekonomi china terlihat semakin bangkit dengan *softpower*-nya berupa investasi dan pinjaman uang dalam proyek besar yaitu *Belt And Road Initiative* sebagai bentuk ekspansi ekonomi china di dunia, khususnya ke negara dikawasan Afrika. Dalam penelitian ini membahas permasalahan tentang bagaimana investasi dan pemberian pinjaman tersebut dapat berubah menjadi Debt-Trap bagi negara Kawasan Afrika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam kerjasama investasi dan memberi pinjaman di Kawasan Afrika, mengetahui bagaimana kebijakan BRI tersebut dapat berubah menjadi Debt-Trap dan mengetahui bagaimana posisi *power* negara China maupun negara di Kawasan Afrika. Penelitian ini menggunakan konsep *Debt-Trap*, *Power*, *Structural Power*. Dalam menulis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian ini membahas bangkitnya China di era Xi Jinping setelah terjadinya reformasi ekonomi dengan menerapkan strategi ekonomi Xi Jinping yaitu *Belt And Road Initiative* dan FDI atau investasi luar negeri China sebagai *Softpower*. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung ekspansi ekonomi China. Untuk mewujudkan hal tersebut China menjalin kerjasam dengan negara di kawasan Afrika seperti, Djibouti, Nigeria, Zimbabwe dan Kamerun.

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu China memilih kawasan Afrika sebagai ladang investasi karena banyak di negara Afrika yang masih berkembang dan perlu bantuan dana dalam membangun dan mengolah sumber daya alamnya seperti China. Namun dengan adanya permasalahan ekonomi atau sistem perekonomian negara yang buruk, membuat negara tersebut menjadi terkena *Debt-Trap* dari kebijakan BRI tersebut. Sebenarnya tidak semua negara yang menerima bantuan investasi terkena *Debt-Trap*, namun karena adanya keberhasilan China dalam mengendalikan *Structural Power* dengan *Material Goods* yang sangat kuat di BRI sebagai *Ideational Goods* yang menjadi *Exclusive Goods* yang dapat mempengaruhi kekuatan interaksi dengan negara-negara tersebut yang dapat membuat kebijakan pemberian pinjaman dan investasi dapat berubah menjadi *Debt-Trap.*

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Anam dan Ristiyani, dua orang mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mataran-NTB yang berjudul Kebijakan *Belt And Road Initiative*. Latar belakang

penelitian ini menjelaskan tentang *Belt And Road Initiative*(BRI) pada tahun 2013 yang bertujuan menghubungkan ekonomi Eurasia dengan infrastruktur, perdagangan, dan investasi. BRI terdiri dari 2 komponen utama yaitu *the Silk Road Economic Belt* dan the *21st Century Maritime Silk Road. Silk Road* merupakan jalur penghubung darat, sedangkan *the 21st Century Maritime Silk Road* jalur penghubung laut. Tujuan dalam penelitian ini yaitu Mengetahui bagaimana kebijakan *Belt And Road Initiative* pada masa pemerintahan Xi Jinping; Mengetahui kepentingan nasional dalam penerapan Kebijakan *Belt And Road Initiative*. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya BRI.

Penelitian ini membahas tentang Neorealisme menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Tiongkok membuat kebijakan BRI. Pertama, Tiap negara bergerak atas kepentingan nasional mereka, dalam hal ini Tiongkok bergerak karena membutuhkan pasokan bagi negara mereka. Kedua, adanya distribusi kekuasaan, dimana tiap negara selalu berusaha menyeimbangkan kekuasaan dengan negara lain, dalam hal ini Tingkok berusaha mencari kepemimpinan di Asia dan bersaing ketat dengan Jepang. Ketiga, berbicara tentang perilaku negara dalam dunia internasional yang menginginkan hegemoni di berbagai bidang. Dalam hal ini Tiongkok berusaha mencari hegemoni mereka di bidang ekonomi dan keamanan melalui kebijakan BRI yang diterapkannya.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Irianti yang merupakan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Hiperinflansi di Zimbabwe. Latar belakang penelitian ini menjelaskan tentang menjelaskan peran dari IMF di beberapa negara Afrika dalam upaya meningkatakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. "*International Monetary Found* (IMF) melakukan *observasi* di beberapa negara angggotanya di Afrika, terutama di Zimbabwe. Republik Zimbabwe (Gross Domestoc Product (GDP) perkapita senilai $500), pada tahun 2008 mengalami hiperinflasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor pendorong, pengaruh utang luar negeri terhadap hiperinflansi dan strategi pemerintah dalam mengatasi hiperinflansi tahun 2007-2011.

Penelitian ini menjelaskan faktor pendoroang utang luar negeri di zimbabwe meliputi kas negara yang mengalami defisit karena pengelolaan ekonomi yang buruk oleh Presiden Mugabe. Pendapatan pemerintah dari pajak sering tidak cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Impor produk Zimbabwe lebih besar daripada ekspor produk ke luar negeri yang berimbas pasa penurunan devisa negara Zimbabwe. Ekonomi Zimbabwe mencatat pertumbuhan riil lebih dari 9% per tahun pada 2010-2011 sebelum melambat menjadi 5% pada tahun 2012 disebabkan panen yang menurun dan pendapatan berlian yang rendah. Kenaikan harga barang dan jasa yang terus menerus secara umum menyebabkan Zimbabwe mengalami hiperinflansi.

Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap hiperinflansi di Zimbabwe ada dua meliputi pengaruh internal yaitu a. membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan melakukan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mengimpor produk dari luar negeri, hal ini dilakukan karena tidak adanya produk dalam negeri yang dibutuhkan masyarakat. Utang luar negeri yang diberikan IMF pada Zimbabwe termasuk kategori ketiga yaitu pinjaman anggota anggota berpenghasilan rendah termasuk dalam Fasilitas Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan atau *Poverty Reduction And Growth Facility* (PRGF). Mengurangi kemiskinan, pinjaman dari IMF membantu Zimbabwe menjalankan roda pemerintahan dan dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam negeri.

Pengaruh eksternal, ketergantungan dan bargaining position lemah. Pinjaman yang diberikan IMF memberikan efek negatif bagi Zimbabwe menjadi negara ketergantungan. IMF tidak menuntut pelunasan utang namun dalam periode tertentu utang tersebut terus berbunga sehingga berpengaruh terhadap *Bargaining Position* yang menjadi lemah. Penelitian ini juga menjelaskan Strategi Pemerintah Zimbabwe untuk mengatasi hiperinflansi (2007-2011) menggunakan strategi internal dengan menjalankan kebijakan dolarisasi untuk membayar tentara serta pegawai negeri pada tahun 2008 dan pemanfaatan utang secara efektif sebagai strategi pengelolaan utang yang tepat, bertanggung jawab dan terukur dalam strategi pengelolaan utang jangka menengah. Strategi eksternal dengan mengutang pada lembaga nasional dan internasional, lembaga nasional yaitu AFDB (*African Development Bank)* adalah bank yang didirikan oleh negara-negara Afrika untuk

membantu negara-negara Afrika yang kesulitan ekonomi dan lembaga internasional yang memberikan utang pada Zimbabwe di antaranya Paris Club, Non-Paris Club, IMF, WB, EIB dan lain-lain.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hide Ohashi, mahasiswa departemen ekonomi di Universitas Shensu yang berada di Tokyo, Jepang. Dalam penelitian ini tertulis bahwa Tiongkok saat ini menggeser pola pembangunannya dari investasi, ekspor ke konsumsi, pertumbuhan permintaan domestik. Dalam tahap baru pembangunan berorientasi domestik, peran seperti apa yang diharapkan China dengan menerapkan kebijakannya. Hal ini bukan lagi menjadi sarana mendapatkan mata uang asing dan teknologi, akan tetapi sebagai meningkatkan peranan China dalam pemerintahan global. Inisiatif BRI yang diusulkan oleh sekretaris Xi Jinping pada 2013 menjadi strategi besar dalam tahap baru kebijakan pembukaan China. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan apa yang diinginkan oleh China dalam melakukan kebijakan pembukaan China BRI di tatanan pemerintahan global.

Dalam penelitian ini membahas tentang Membahas yang pertama komitmen China dalam tatanan pemerintahan global yang di dalamnya membahas tatanan ekonomi internasional China dan tantangan yang harus di hadapi China dalam tatanan ekonomi internasional serta komitmen China terhadap rezim internasional yaitu Rezim Perdagangan Internasional WTO dan G7. Kedua yaitu hubungan antara China dengan negara-negara tujuan BRI. Ketiga membahas studi kasus pemberian bantuan dana pembangunan yang di dalamnya mengkaji tentang prinsip dasar pemberian bantuan, pencapaian besar yang akan dicapai serta hubungan China dengan rezim yang sudah ada. Kesimpulan yang terdapat dari artikel ini yaitu China akan selalu terlibat dalam tatanan pemerintahan global dan akan mendominasi hal tersebut dengan karakteristik dari Tiongkok. Dengan kata lain China ingin mempengaruhi atau menguasai tatanan pemerintahan dunia dengan karakteristik Tiongkok.

Kebijakan pembukaan China bukan lagi tentang pengembangan kerjasama bilateral, akan tetapi sudah merepresentasikan kerjasama multilateral. Dengan kebijakan tersebut membuat China seperti memberikan tanda ancaman kepada dunia sebagai pembuat peraturan baru dunia daripada G7. Dengan kebijakan

tersebut China merencanakan akan mendapatkan keuntungan besar dimasa yang akan datang seiring berlakunya kebijakan pembukaan China tersebut.

Tabel 1.1 Komparasi Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	**Yogo Aminanto Pribadi**	**Hari Prasetio**	**Syaiful Anam dan Ristiyani**	**Irianti**	**Hideo Ohashi**
Judul	Kepentingan Ekonomi Dan Keamanan China Dalam Kebijakan New Silk Road Tahun 2008-2013	Debt-Trap Diplomacy : Strategi China Era Xi Jinping Dalam Menguasai Ekonoi Di Kawasan Afrika (2019)	Kebijakan *Belt And Initiative* Road (BRI) Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping (2018)	Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Hiperinflasi Di Zimbabwe (2013)	The *Belt And Road Initiative*(BRI) Dalam Konteks Membuka Kebijakan China (2019)
Tujuan Penelitian	Mengetahui alasan China tetap menerapkan kebijakan New Silk Road di era Hu Jintao hingga Xi Jinping; Mengetahui perkembangan dinamika hubungan luar negeri China serta perkembangan ekonomi, politik dan liberalisasi kerjasama internasional china, khususnya periode 2008-2013.	Menjelaskan bagaimana strategi kerjasama investasi China di Afrika; Menguraikan strategi kerjsama inavestasi dan pinjaman menjadi metode *Debt-Trap*; Menjelaskan bagaimana posisi *Power* baik di China maupun Afrika dalam konteks pemberian hutang.	Mengetahui bagaimana kebijakan *Belt Road Initiative* pada masa pemerintahan Xi Jinping; Mengetahui kepentingan nasional dalam penerapan Kebijakan *Belt Road Initiative*. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya BRI.	Menjelaskan faktor pendorong, pengaruh utang luar negeri kepada Zimbabwe dan strategi pemerintah mengatasi hiperinflansi di Zimbabwe tahun 2007-2011.	Penelitian ini berupaya memposisikan BRI dalam kebijakan pembukaan China yang berfokus pada perannya yang semakin besar dalam tata kelola global rezim ekonomi internasional.
Metode	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.	Penelitian ini bersifat analisis kualitatif.	Penelitian ini bersifat analisis deskriptif	Penelitian ini bersifat analisis deskriptif
Pembahasan	Sejarah New Silk Road dan alasan di bidang ekonomi tentang China yang tetap mengembangkan New Silk Road; Membahas Politik dan keamanan China yang memutuskan mengembangkan kembali New Silk Road di masa Hu Jintao hingga Xi Jinping 2008-2013.	Kemunculan istilah Debt-Trap;Debt-Trap sebagai strategi ekonomi; Debt-Trap di masa Xi Jinping; Pemetaan Potensi Goods dan Needs China dalam Pembentukan Structural Power.	Kepentingan Nasional : Keamanan Energi; Pembentukan AIIB dibidang Ekonomi;	Faktor pendorong utang luar negeri di Zimbabwe; Pengaruh utang luar negeri terhadap hyperinflasi di Zimbabwe; Strategi pemerintah Zimbabwe untuk mengatasi hyperinflasi	Membahas komitmen China dalam tatanan pemerintahan global; menjelaskan hubungan antara China dengan negara tujuan BRI; Studi kasus pemebrian bantuan dana pembangunan oleh China

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional Menurut Hans J. Morgenthau adalah kepentingan suatu bangsa yang bertujuan untuk mencapai kelangsungan hidup bangsa, keamanan nasional, integritas wilayah dan kesejahteraan ekonomi. [17] Konsep kepentingan nasional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial dan kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. [18]

Kepentingan nasional yang bersifat vital adalah kepentingan nasional yang berkaitan dengan kelangsungan hidup negara dan nilai-nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional yang bersifat non vital yaitu, kepentingan nasional yang tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional juga berperan dalam menentukan perilaku suatu negara.

Kepentingan nasional bisa menjadi pembenaran dari setiap kebijakan yang dipilih oleh negara. Menurut May Rudy berpendapat bahwa : [19]

> *"Kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubung dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama di antara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu, keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity) merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara*"

---

[17] Cecep, S. 2010. Politik Antar Bangsa Terjemahan S. Maimoen & A.M Fatwan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta. P. 33

[18] Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Politik. Graha Ilmu : Yogyakarta. p. 67-69

[19] May Rudi. 2002. Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Refika Aditama : Bandung. Hal. 116

Dalam mencapai kepentingan nasional, negara menjadi aktor utama untuk mencapai hal tersebut. Tiap negara harus memiliki strategi dan power yang dapat mendukung tercapainya kepentingan nasional negara tersebut. Menurut penjelasan Jon. C. Pevehouse dalam bukunya *International Relation*: [20]

"*Actor use strategy to pursue good outcomes in bargaining with one or more other actors. State deploy power capabilities as leverage to influence each other's action (Aktor menggunakan strategi untuk mengejar hasil yang baik dalam perundingan dengan satu atau lebih pelaku lainnya. Negara menyebarkan kemampuan daya sebagai suatu cara untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain*.)"

Dalam dunia internasional, kebijakan suatu negara merupakan strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan tersebut dibuat sesuai untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut dan mencapai kepentingan nasionalnya. Dan hal ini dapat dilakukan dengan adanya keterbukaan dengan negara lain, sehingga dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara lain.

Menurut Donald E. Nuechterlein, kepentingan nasional dibagi menjadi 4 dasar, yaitu: [21]

a. *Defence Interests* (Kepentingan Pertahanan): kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, serta ancaman politik dari negara lain. Kepentingan ini fokus terhadap perlindungan negara dan bangsa terhadap ancaman kekerasan fisik dari negara lain
b. *Economic Interests* (Kepentingan Ekonomi) : kepentingan dimana pemerintah berupaya dalam meningkatkan perekonomian negaranya dengan menjalin hubungan ekonomi bersama negara lain
c. *World Order Interests* (Kepentingan Tata Internasional) : kepentingan yang mempertahankan sistem politik internasional serta ekonomi internasional yang memberikan keuntungan bagi negaranya.

---

[20] Joshua S. Goldstein dan Jon. C. Pevehouse. 2010. International Relations. Longman : New York. hal. 71

[21] Donald E Nuechterlein. 1976. National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2. Hal.248

d. *Ideological Interests* (Kepentingan Ideologi) : kepentingan untuk mempertahankan ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Dari empat (4) point utama tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun variabel yang digunakan yaitu dalam kepentingan pertama yaitu ekonomi akan mencari data berupa pendapatan domestik bruto (PDB), Pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor dan investasi asing. Kedua, kepentingan ideologi akan menampilkan variabel berupa cara Tiongkok melakukan ekspor ideologi melalui BRI. Ketiga, kepentingan pertahanan akan menjelaskan variabel adanya persaingan pengaruh atau kekuatan militer oleh Tiongkok melalui BRI di Afrika khususnya Zimbabwe. Keempat, kepentingan tata internasional akan menjelaskan variable bagaimana Tiongkok mencoba menstabilkan keadaan luar negeri melalui program BRI, adapun variabel yang akan dijelaskan yaitu bagaimana Tiongkok mencoba menjadi kekuataan sentralisasi di dunia internasional.

2.2.2 Konsep Kebijakan Luar negeri

Menurut Mark R. Amstudz mendefinisikan Kebijakan luar negeri sebagai :

> *"Tindakan eksplisit dan implisit dari pejabat pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan nasional di luar batas teritorial negara*".[22]

Dalam definisi tersebut terdapat tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan suatu negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang yang membawa dampak bagi aktor-aktor lain di luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari pengertian kebijakan luar negeri.

Menurut Kegley dan Wittkopf menekankan kebijakan luar negeri sebagai:

---

[22] Amsutz, Mark R. International Conflict and Cooperations: An Introduction To World politics (1995). Dubuque: Brown & Benchmark. Hal 146, dalam Jermadu, Prof. Alexis, Ph.D. Politik Global dalam Teori dan Praktek. Graha Ilmu : 2008. Yogyakarta.

> ”*Keputusan yang dibuat oleh otoritas yang mengatur untuk mewujudkan tujuan internasional*“. [23]

Berdasarkan penjelasan dua penulis tersebut yang juga menekankan bahwa studi kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat yang digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya pengertian menurut Howard Lentner yang mengartikan kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu penentuan tujuan yang hendak dicapai, pengerahan sumberdaya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, dan pelaksanaan dari kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan sumberdaya yang sudah ditetapkan[24]. Berikutnya pengertian menurut James N. Rosenau yang berpendapat bahwa konsep kebijakan luar negeri ke dalam tiga pengertian yang berbeda baik substansi maupun cakupannya. Pada tingkat pertama kebijakan luar negeri dipahami sebagai seperangkat prinsip atau orientasi umum yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain dilingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah atau tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.[25]

Berdasarkan berbagai penejalasan definisi di atas pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara menghasilkan perilaku atau tindakan negara yang membawa dampak eksternal atau mempengaruhi aktor-aktor lain di lingkungan eksternal.

Berdasarkan penjelasan konsep kebijakan luar negeri dari beberapa ahli. Terlihat bahwa dalam penelitian ini Tiongkok dalam memenuhi dan menjalin kerjasama investasi dan pemberian pinjaman, memerlukan sebuah kebijakan luar

---

[23] Kegley Jr.,Charles W dan Eugene R. Wittkopf. World politics: Trends and Transformation, Belmont: Wadsworth,2003. Ibid hal, 62.

[24] Lentner, Howard. Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach. Charles F. Merril Publishing Company, Ohio: 1974, Ibid. hal, 65

[25] James N. Rosenau, Gavin Royd and Kenneth Thompson (1976). World Politics: An Introduction, New York: The Free Press, hal. 18. Ibid. hal, 66

negeri yang tepat, supaya kebijakan luar negeri tersebut dapat memenuhi tujuan dari kepentingan nasional Tiongkok. Jadi dengan kebijakan luar negeri BRI yang digagas oleh Tiongkok merupakan alat politik untuk mendukung tercapainya kepentingan nasional Tiongkok di bidang ekonomi politik internasional.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus kepada kepentingan Tiongkok yang tetap tertarik melakukan investasi dan memberikan pinjaman dana kepada Zimbabwe dalam rangka menerapkan kebijakan BRI di kawasan Afrika khususnya Zimbabwedalam periode Tahun 2013 sampai 2018. Tiongkok tetap melakukan kerjasama dengan Zimbabwe ketika IMF dan BI telah menghentikan semua jenis bantuan dana kepada Zimbabwe. Karena latar belakang sistem ekonomi yang buruk serta terjadinya pelanggaran HAM yang tidak kunjung diselesaikan oleh Zimbabwe membuat IMF dan BI memberhentikan bantuan tersebut.

Dalam memecahkan permasalahan tersebut, peneliti menggunakankonsep Kepentingan Nasional yang diambil dari 4 faktor penjelasan Donald E. Nuechterlein yang menjelaskan kepentingan nasional berdasarkan Kepentingan Pertahanan, Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Tata Internasional dan Kepentingan Ideologi. Dalam penelitian ini juga mengguankan konsep kebijakan Luar Negeri yang berasal dari Mark R. Amstudz yang mengartikan kebijakan luar negeri dalam tiga faktor utama yaitu tindakan atau kebijakanpemerintah, pencapaiankepentingannasional dan jangkauankebijakanluarnegeri yang melewatibataskewilayahansuatunegara. Dua konsep tersebut digunakan untuk mengetahui menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

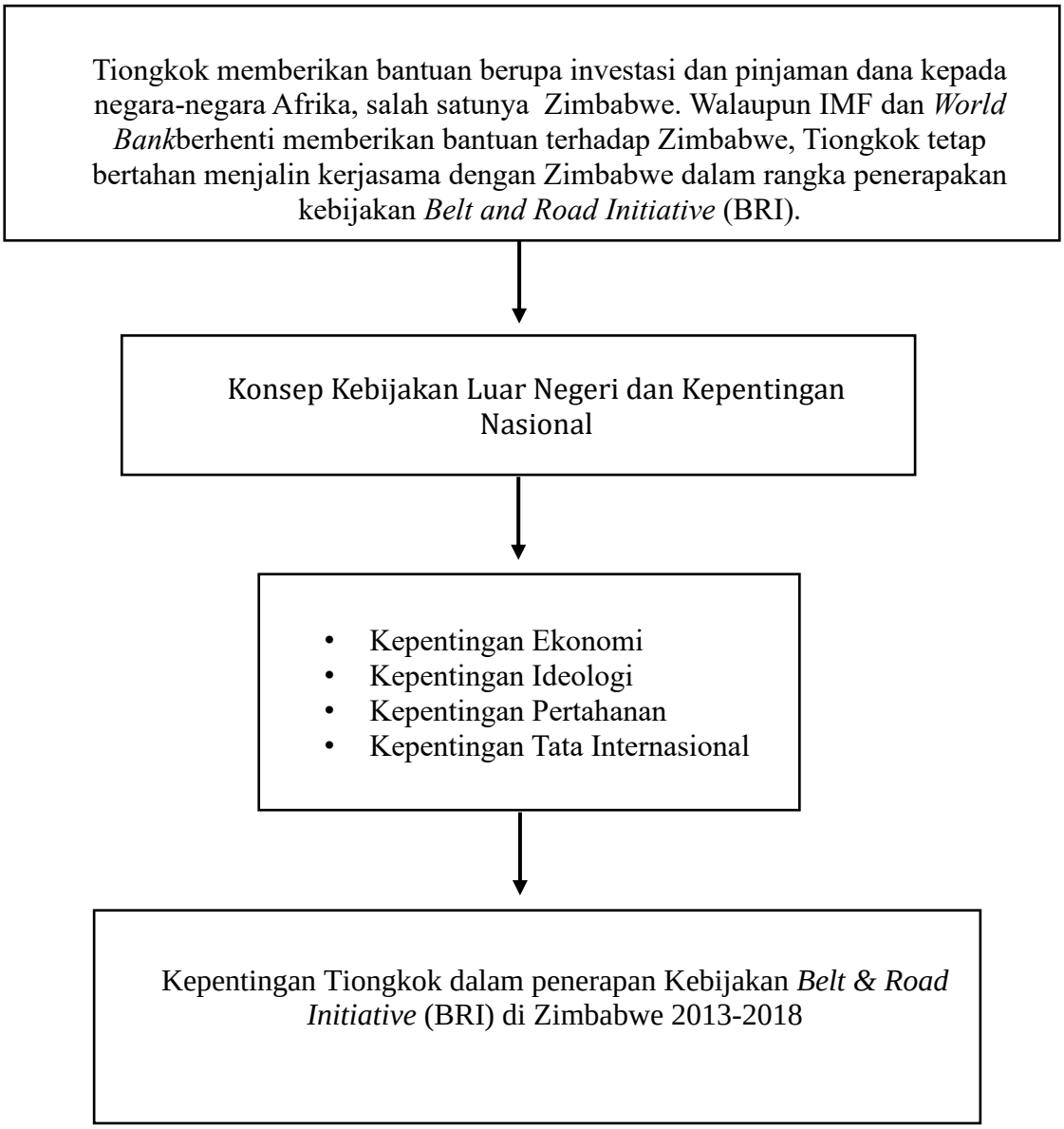

Gambar 2.1 KerangkaPikir.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Cresswell, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang mengeksplorasi suatu permasalahan. Penelitian kualitatif membuat peneliti membangun sebuah gambaran secara menyeluruh, menganalisis kalimat, memberikan laporan secara rinci dari informan. [26]

Metode penyajian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisa dan menggambarkan suatu isu menggunakan konsep yang relevan. Menurut Neuman, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan isu secara rinci serta mendokumentasikan mekanisme dan proses kausal atau sebab akibat suatu permasalahan. [27]

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa isu mengenai " Kepentingan Tiongkok Dalam Penerapan *Kebijakan Belt And Road Initiative* (BRI) Terhadap Ekonomi Zimbabwe ".

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini digunakan untuk membatasi penelitian kualitatif agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang diperoleh. Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian

---

[26] Prof. Dr. Emzir, M.Pd. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Raja Garfindo Perasada. Hal.2

[27] Neuman, W. Lawrence. 2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitave Approaches. USA: Pearson. Hal. 38

dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian agar dapat memilih data yang relevan dan tidak relevan. [28]

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada kepentingan negara Tiongkok dalam menerapkan kebijakan BRI pada negara Zimbabwe yang dilihat berdasarkan :

a. Kepentingan Ekonomi & Politik Tiongkok kepada Zimbabwe
b. Kepentingan Ideologi Tiongkok kepada Zimbabwe
c. Kepentingan Pertahanan Tiongkok kepada Zimbabwe
d. Kepentingan Tata Internasional Tiongkok kepada Zimbabwe

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif adalah sumber dari deskripsi yang kaya, dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti , memahami alur peristiwa serta menjelaskan sebab-akibat dari suatu kasus. [29]

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil observasi data yang telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya. Adapun data dikumpulkan merupakan merupakan data dari tahun 2013 sampai 2018 mengenai Kepentingan Tiongkok Dalam Penerapan Kebijakan *Belt And Road Initiative* (BRI) Di Zimbabwe. Selain itu penulis mengumpulkan data kualitatif berupa berita atau pernyataan serta jurnal ilmiah yang berhubungan dengan *Belt And Road Initiative* Tiongkok di Zimbabwe. Data tersebut telah diperoleh melalui hasil analisis yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, website resmi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Data tersebut diperoleh dari dokumentasi berupa Berita resmi yang diakses melalui situs http://maritimnews.com/, http://media.africaportal.org/,

[28] Lexy, Moleong. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 237
[29] Miles, Matthew. B dan A, Michael Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis. UK: Sage Publication. Hal.1

http://thediplomat.com/,https://kemlu.go.id/, serta https://africacenter.org/, website resmi tersebut berisi tentang berita kerjasama Program BRI antara Tiongkok dan Zimbabwe. Selain itu peneliti juga mengambil data dari website resmi http://www.focac.org/ yang merupakan website resmi dari organisasi FOCAC yang dibuat khsus untuk membahas program FOCAC. Peneliti juga mengambil data perkembangan ekonomi, investasi, ekspor-impor dari website resmi http://oec.world serta data lainnya yang bersumber dari artikel resmi, jurnal internasional dan buku/laporan ekonomi yang berhubungan dengan Kepentingan Tiongkok Dalam Penerapan Kebijakan *Belt And Road Initiative* (BRI) Terhadap Ekonomi Zimbabwe.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi literatur, yaitu peneliti sudah mengumpukan data dari sejumlah literatur seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan artikel yang dimiliki oleh peneliti atau bisa diakses secara online melalui website resmi yang tersedia di http://repository.umy.ac.id, http://journal.unair.ac.id, http://eprints.umm.ac.id, website tersebut menyediakan jurnal ilmiah secar online dan memberikan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian
b. Studi dokumentasi, yaitu peneliti sudah mengumpulkan data dari sejumlah dokumen-dokumen resmi yang terdapat di situs-situs resmi. Dokumen tersebut seperti data, pernyataan pers dan laporan dari badan pemerintahan yang berwenang serta dari organisasi resmi terkait penelitian. Data-data tersebut dapat diakses melalui situs resmi seperti http://www.focac.org/, yang berisi data kerjasama FOCAC antara Tiongkok dengan negara-negara Afrika, http://oec.world yang menyediakan data perkembangan ekspor-impor, investasi asing dan GDP dari tiap negara.

3.5 Teknik Pengolahan

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah analisis data. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga tahapan yaitu : [30]

A. Kondensasi data

Reduksi data adalah suatu analisis data yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dengan suatu cara untuk dapat menarik kesimpulan dan diverifikasi. Peneliti sudah mencari data yang berhubungan dengan kerjasama Tiongkok dengan Zimbabwe dan kebijakan luar negeri BRI yang diterapkan Tiongkok di Kawasan Afrika, khususnya negara Zimbabwe. Setelah data diperoleh penulis telah memilah data dan menyingkirkan data yang tidak sesuai atau relevan dengan fokus penelitian.

B. Penyajian data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan penyajian data yang mempermudah dalam melihat gambaran secara kesuluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Peneliti sudah menyajikan beberapa asumsi, konsep, definisi serta deskripsi mengenai informasi yang telah diklasifikasikan, diolah, dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti mengolah data tersebut menggunakan konsep yang sesuai dan relevan dengan penelitian dan telah disajikan pada bagian Bab IV yang merupakan hasil penelitian penulis setelah melakukan studi literatur dan dokumentasi. Penulis sudah menjelaskan secara rinci hasil penelitian dalam 4 subab yang menjelaskan kepentingan ekonomi, eepentingan ideologi, kepentingan pertahanan serta kepentingan tata internasional.

C. Pengambilan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data ini. Dalam tahap ini peneliti telah menarik kesimpulan dari data-data yang telah

[30] Miles, Matthew.B dan A, Michael Huberman. Op.cit, Hal. 10-11

dipahami sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh sudah digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, serta memperlihatkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya tujuan penelitian. Bagian ini peneliti sajikan pada Bab V yang merupakan Bab Kesimpulan dan Saran yang berisi tentang kesimpulan dari Penelitian Kepentingan Tiongkok Dalam Penerapan Kebijakan *Belt And Road Initiative* (BRI) di Ekonomzi Zimbabwe tahun 2013-2018

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian sub bab ini berisi hasil penilitan yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *Kebijakan Belt And Road Initiative* yang diterapkan Tiongkok di Zimbabwe jika dilihat dari konsep kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein yang menjelaskan kepentingan nasional menjadi 4 yaitu Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Pertahanan, Kepentingan Ideologi, Kepentingan Tata Internasional.

Jadi dapat dikatakan dari penerapan program BRI oleh Tiongkok di Zimbabwe terdapat kepentingan ekonomi di dalamnya yang sesuai dengan bidang BRI itu sendiri, yaitu meningkatkan dan mengembangkan perekonomian dan infrastruktur bagi negara yang dilalui atau ikut serta dalam program tersebut. Dalam hal pertahanan, kepentingan Tiongkok di Zimbabwe terlihat sebatas dalam persaingan dalam pengaruh besarnya peran Tiongkok dalam mengatur keamanan di Afrika melalui misi perdamaian PBB sejak diterapkanyya BRI, yang jika dibandingkan dengan AS, Tiongkok berada jauh dibawah AS, namun terlihat adanya persaingan peningkatan perannya yaitu AS sebesar 43% dan Tiongkok sebesar 19%. Dalam hal idologi, Tiongkok tidak terihat secara spesifik terdapat kepentingan ideologi dalam penerapan progam BRI. Yang terakhir dalam kepentingan tatanan internasional, Tiongkok melalui BRI, berupaya untuk melebarkan pengaruhnya hingga ke Afrika dengan penerapan BRI sebagai bentuk sistem alternatif baru yang dapat bersaing dalam sistem tatanan internasional namun yang terlihat hanya sebatas perluasan pengaruh kekuatan ekonomi saja, jadi kepentingan Tiongkok dalam penerapan kebijakan BRI, tidak terlihat adanya

kepentingan tata internasional, karena penerapan BRI di Zimbabwe hanya sebatas perluasan pengaruh ekonomi Tiongkok saja dan tidak sampai adanya pembentukan norma dan aturan baru yang berpengaruh di Zimbabwe.

Dari kesimpulan yang dijabarkan melalui 4 kepentingan menurut Donald E. Nuechterlein dapat dikatakan jika kebijakan BRI yang diterapkan Tiongkok di Zimbabawe lebih dominan untuk memenuhi kepentingan ekonomi Tiongkok yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan industrinya akan bahan mentah, memperluas pasar dan jangkauan keuangannya ke negara-negara tujuan BRI hingga ke Afrika khususnya Zimbabwe.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat menjadi masukan bagi upaya pencapaian Program *Belt And Road Initiative* oleh Tiongkok di Zimbabwe :

1. Karena Tiongkok merupakan negara yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO), sebaiknya ditambahkan penerapan prinsip-prinsip dalam BRI yang mengatur tentang penanaman modal seperti yang dilakukan WTO yaitu *Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Dalam pemberian hutang luar negeri ke negara tujuan BRI, sebaiknya dilakukan secara transparan atau keterbukaan, sehingga negara yang tergabung dalam BRI tidak berada dalam kondisi yang menyebabkan ketergantungan terhadap Tiongkok dan menyebabkan hutang negara peminjam semakin besar.
2. Dalam penerapan kebijakan BRI di setiap negara tujuan alangkah baiknya untuk dibuatkan peraturan yang telah disepakati kedua negara antara Tiongkok dan negara penerima, sehingga penerapan kebijakan tersebut memiliki peraturan tersendiri yang mengatur tentang kebijakan BRI yang salah satunya di Zimbabwe. Sehingga dalam pelaksanaannya terlihat jelas dan tidak menimbulkan pelanggaran dalam penerapan program BRI di Zimbabwe.
3. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan di atas, menunjukan bahwa Zimbabwe telah banyak mengandalkan Tiongkokuntuk menstabilkan kondisi negaranya setelah adanya sanksi dari beberpa pihak. namun, terlalu mengandalkan

bantuan materi dari Tiongkok dalam jangka waktu yang panjang juga bukan suatu hal yang baik bagi negara. Terlena akan hutang dapat memicu suatu negara terjebak dalam kondisi gagal bayar. Zimbabwe harus bisa perlahan lepas dari pengaruh china melalui:

- Zimbabwe harus menstabilkan kondisi dalam negerinya terlebih dahulu
- Mengembangkan dan menguatkan industri dalam negerinya terutama untuk pengelolaan SDA negara
- Berusaha untuk terus mencari dan menjalin kerjasama baru dengan beberpa pihak lain sehingga bisa mengurasi persentasi ketergantungan ekonomi negara terhadap china.

4. endapatkan sanksi internasional akan sangat merugikan negara terbukti dengan terbatasnya gerakan Zimbabwe dalam mendpatkan pembiayaan eksternal untuk pembangunan negara. oleh karena itu, Zimbabwe diharapkan dapat berhati hati kembali dalam mengambil keputusan dan tentu saja untuk dapat menjaga kestabilan kondisi dalam negeri dan meminimalisir adanya pelanggaran HAM dinegara mereka. Karna hal tersebut adalah yang biasa menjadi alasan suatu negara mendapatkan sanksi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adit, Berita "*Pergantian Istilah OBOR untuk hindari kesan China Sentris"*, http://maritimnews.com/2017/05/pengamat-pergantian-istilah-obor-untuk-hindari-kesan-china-sentris/ diakses pada 1 April 2021 Pukul 13.00 WIB

AFRODAD, *"The China-Zimbabwe Relation : Impact on Debt and Development in Zimbabwe"*, Hal 25 diakses melalui https://media.africaportal.org/documents/China-Zimbabwe_relations__implications_on_Zimbabwes_Development.pdf pada15 September 2021 Pukul 15.00 WIB

Amb. Cohen, Zimbabwe Was a Victim of Mugabe's Marxist Ideology (16 November 2017) diakses dari http://www.cohenonafrica.com/homepage/2017/11/16/zimbabwe-was-a-victim-of-mugabes-marxist-ideology pada 10 Oktober 2021 Pukul 13.21

Aminanto, Yogo P, *"Kepentingan Ekonomi dan Keamanan China Dalam Kebijakan New Silk Road Tahun 2008-2013"*, karya ilmiah tahun 2017. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19324

An, Wulan Nuuru, *"Analisis Teori Strukturisasi Dalam MemahamiHubungan Kerja Sama China Dengan ZimbabwePaska Isolasi Komunitas Internasional (2003-2012)"*, Jurnal Analisis HI, Vol 7 No. 1 Januari 2018. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi0242607d41full.pdf

Bansari K, beritahttps://thediplomat.com/2019/05/what-to-make-of-indias-absence-from-the-second-belt-and-road-forum/ diakses pada 1 April 2021 Pukul 14.35

Barratut Taqiyah Rafie, *"Kisah dibalik naik turunnya Ekonomi Zimbabwe"*, https://internasional.kontan.co.id/news/kisah-di-balik-naik-turunnya-ekonomi-zimbabwe, Diakses pada minggu 11 April 2021 Pukul 16.00 WIB

Blake H, berita *"Malaysia's Canceled Belt And Road Initiative Projects and the Implications for Chinah"*, https://thediplomat.com/2018/08/malaysias-canceled-belt-and-road-initiative-projects-and-the-implications-for-china/ diakses pada 1 April 2021 Pukul 14.34 WIB

Caiyu, Liyu, Global Times "China, African countries call on US to remove illegal sanctions on Zimbabwe" diakses pada https://www.globaltimes.cn/page/202110/1237275.shtml Pukul 14.40 WIB

Council on Foreign Relations, *Chinas's Approach to Global Governance*, diakses dari https://www.cfr.org/china-global-governance/

Council on Foreign Relations, *China in Africa* diakses dari https://www.cfr.org/backgrounder/ china-africa pada 14 November 2021 Pukul 22.26

Dewanty, Ratih Putri, "*Diplomasi Ekonomi China di Sudan"*. http://eprints.umm.ac.id/37665/1/jiptummpp-gdl-ratihdewan-52869-1-pendahul-n.pdf.

Donald E Nuechterlein. 1976. National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2.

Doran, Stuart, *China and Africa: the Zimbabwe file* (26 Juli 2018), diakses dari https://www.aspistrategist.org.au/china-and-africa-the-zimbabwe-file/ pada 10 Oktober 2021 Pukul 14.32

DW News, "China's Xi Jinping in Zimbabwe amid high expectations", https://amp.dw.com/en/chinas-xi-jinping-in-zimbabwe-amid-high-expectations/a-18885286, Diakses pada 3 September 2021 Pukul 10.00

Ghazzian, Muhammad Alif, "Pembentukan Forum on China-Africa Cooperation oleh Republik Rakyat China, Depok: Dept. Ilmu HI FISIP UI, 2014, Hal 2.

Goldstein, JS dan Pevehouse, JC. 2010. International Relations. Longman : NewYork.

Hadi, Abdul Adnan, *"Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika"*. Bandung: CV. Angkasa, 2008. Hal 7-8 diakses pada 25 September 2021 Pukul 15.00

"*Hauling New Treasure Along the Silk Road"*, Berita New York Times dalam https://www.nytimes.com/2013/07/2a1/business/global/hauling-new-treasure-along-the-silk-road.html , yang diakses pada tanggal 30 Maret 2021 Pukul 16.57 WIB

Huang, Yufan and Deborah Brautigam, *Putting a Dollar Amount on China's Loans to the Developing World* (24 Juni 2020) diakses dari https://thediplomat.com/2020/06/putting-a-dollar-amount-on-chinas-loans-to-the-developing-world/ pada 14 November 2021 Pukul 22.20

Irianti, *"Pengaruh Hutang Luar Negeri Terhadap Hiperinflasi Di Zimbabwe"*. http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/5647. (Diakses pada 19 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB)

"Inflasi di Zimbabwe 100.000 Persen", https://sains.kompas.com/read/2008/02/21/01230169/inflasi.di.zimbabwe.100.000.persen. (Diakses pada 19 Januari 2020 Pukul 12.00 WIB)

Jemadu, A. 2008. Politik Global dalam Teoi dan Politik. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Jermadu, Prof. Alexis, Ph.D. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu

"Keterangan Dasar Negara Republik Zimbabwe", https://kemlu.go.id/harare/id/read/keterangan-dasar-negara-republik-zimbabwe/2727/etc-menu#:~:text=27.&text=Sebelum%20memerdekakan%20diri%20dari%20Inggris,1980%20adalah%20Hari%20Kemerdekaan%20Zimbabwe. (Diakses pada 26 Juni Pukul 20.25 WIB.

Lexy, Moleong. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, Matthew. B dan A, Michael Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis. UK: Sage Publication.

Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, Ambassador Guo gives an exclusive interview to The Herald on China-Zimbabwe relations (10 Juni 2019), diakses dari https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1670821.shtml pada 10 Oktober 2021 Pukul 13.12

Moyo, G. , Nhliziyo, M. and Fayayo, R. (2020) The Entanglement of Zimbabwe in the US-China Geoeconomic Frictions: Defining Winners and Losers. iBusiness.

Nantulya, Paul, *China Promotes Its Party-Army Model in Africa*(28 Juli 2020), diakses dari https://africacenter.org/spotlight/china-promotes-its-party-army-model-in-africa/ pada 10 Oktober 2021 Pukul 13.39

Neuman, W. Lawrence. 2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitave Approaches. USA: Pearson.

"New Chinese-Built Training Center for Tanzanian Army," Army Recognition, February 23, 2018, diakses pada https://www.armyrecognition.com/february_2018_global_defense_security_army_news_industry/new_chinese-built_training_training_center_for_tanzanian_army.html Pukul 15.32 WIB

Nyoni, Thabani. (2019). The Curse is Real in Zimbabwe: Economic Sanctions Must Go! Munich Personal RePEc Archive, Hal. 2-3 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/96911/1/MPRA_paper_96911.pdf diakses pada 25 September 2021 pukul 08.00

Putu, Ni Saraswati Dewi dan Hikmatul Akbar, "*The New Silk Road Cina Di Bawah Pemerintahan Xi Jinping*" Vol.9 No.1 2017. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/download/2484/2117

PetroChina Company Limited Website, Berita tentang *"PetroChina Acquisition of 67% Interests in PetroKhazakstan Completed"*, http://www.petrochina.com.cn/ptr/xwxx/201404/c6c8ef9d2e1540128d1a0d75d94170fb.shtml diakses pada 8 oktober 2021 puku 10.00 WIB

R. Muzapu, Havadi T, Kudai M, *"Belt And Road Initiative: Positioning Zimbabwe for Investment Opportunities"* Buisness School UIBE, Scientific & Academic Publishing tahun 2018. Hal. 3 http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20180801.04.html diakses pada 29 September 2021 Pukul 08.00

Rahayu, W. T. (2017). *"Strategi Tiongkok dalam Mendominasi Hubungan Kerjasama Ekonomi dengan Zimbabwe (2000-2015)".Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, *6*, *No.2*, 5. http://repository.unair.ac.id/68073/1/Fis.HI.91.17 . Rah.h - JURNAL.pdf

Robert, Johni V.K., *"Kebangkitan China Melalui Belt AndRoad Initiative dan (Re)konstruksiHubunganInternasionaldalam Sistem Westphalia"*, Jurnal Analisis HI Vol. 8 No.1 April September 2019, https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/5800/pdf_4, Diakses pada 30 Maret 2021 Pukul 22.38 WIB

Rudi, M. 2002. Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Refika Aditama : Bandung.

Shepard, Wade, What China is Really Up To in Africa (03 Oktober 2019) Diakses dari https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2019/10/03/what-china-is-really-up-to-in-africa/?sh=35949ebc5930 pada 14 November 2021, Pukul 23.08

Sudradjat, C. 2010. Politik Antar Bangsa Terjemahan S. Maimoen & A.M Fatwan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.

Sun, Yun, Political Party Training: China's ideological push in Africa? (5 Juli 2016) diakses dari https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/07/05/political-party-training-chinas-ideological-push-in-africa/ pada 10 Okober 2021 Pukul 13.46

The African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD), *The China-Zimbabwe Relations: Impact on Debt and Development in Zimbabwe*, hal 11. Diakes dari https://media.africaportal.org/documents/China-Zimbabwe_relations__implications_on_Zimbab wes_Development.pdf pada 29 Agustus 2021 pukul 22.23

The Guardian. 2015,*"Zimbabwe to make Chinese yuan legal currency after Beijing cancels debts"*, https://www.theguardian.com/world/2015/dec/22/zimbabwe-to-make-chinese-yuan-legal-currency-after-beijing-cancels-debts#:~:text=Chinamasa%20also%20announced%20that%20Zimbabwe,500bn%25%2C%20 diakses pada 5 september 2021 Pukul 08.00

Tri, Wiwit Rahayu, *Strategi Dalam Mendominasi Hubungan Kerjasama Ekonomi Dengan Zimbabwe (2000-2015)*, UNAIR:FISIP HI, Hal 3

Van, Cobus Staden, How the Extended Rule of China's President Xi will Influenc Africa's Future (11 April 2018), diakses dari https://qz.com/africa/1249772/china-xi-jinping-in-africa-xi-extended-rule-influence-on-african-countries/ pada 10 Oktober 2021 Pukul 15.38

Wonacott,Peter,*In Africa, U.S. Watches China's Rise* (02 September 2011), diakses dari https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903392904576510271838147248 pada 10 Oktober 2021 Pukul 13.31

Xinsong, Wang, *"Pertikaian politik di Zimbabwe mengancam investasi dan kepentingan China di teman segala cuacanya."*, https://thediplomat.com/2016/12/chinas-zimbabwe-risk/ Diakses pada 22 Agustus 2018 Pukul 22.00 WIB.

Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001, Public Law 107-99-DEC. 21, [S. 494]. Diakses pada https://www.congress.gov/107/plaws/publ99/PLAW-107publ99.pdf pukul 13.30 WIB

"Zimbabwe Memutuskan Untuk Gunakan Yuan China Sebagai Mata Uang Utama", http://forum.forexindo.com/threads/zimbabwe-memutuskan-untuk-gunakan-yuan-china-sebagai-mata-uang-utama.332459/. Diakses pada 20 Januari 2020, Pukul 14.00 WIB.

Zulkarnain, "*Peran Uni Afrika Dalam Menyelsaikan Konflik di Kongo Zulkarnain. Politik",* Buku Ilmu dan Budaya Vol. 1 Tahun 2009 http://repository.unas.ac.id/91/1/16.%20ZULKARNAIN%20SIP.%2C%20M.Si..pdf